



INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP  
Open Budgets. Transform Lives.

## e-Buletin

Maret-April 2013 No.71

### Yang Kita Ketahui Mengenai Pekerjaan Anggaran Masyarakat Sipil

[Apa yang Dapat Diselesaikan oleh Organisasi Masyarakat Sipil, dan Pendekatan Apa yang Paling Efektif?](#)

[Belajar sambil Melakukan: Pendekatan Kemitraan yang Aktif](#)

### Teknologi untuk Pemerintahan yang Lebih Baik dan Memberdayakan Masyarakat

[Sauti za Wananchi: Menggunakan Teknologi Telepon Seluler untuk Mendapatkan Umpan Balik yang Tepat Waktu dari Warga Negara mengenai Penyediaan Layanan Masyarakat di Tanzania](#)

[Open Data Initiative yang Memberdayakan Warga Negara dan Memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil](#)

### Masyarakat Sipil Mendesak Anggaran Terbuka di Tingkat Lokal dan Nasional

[Koalisi Mesir Menggugat Pemerintah, Menuntut Anggaran Publik](#)

[Bekerja Sama untuk Memisahkan Menjadi Beberapa Bagian : Devolusi di Kenya](#)

### Publikasi

#### IBP Menerbitkan Buku yang Sangat Penting!

Buku terbitan baru dari IBP, *Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability* (diterbitkan oleh *Brookings Institution Press*) menyajikan bukti dari sejumlah kasus baru untuk menjawab pertanyaan pokok mengenai transparansi anggaran, pertanggung jawaban anggaran, dan partisipasi anggaran:

- Bagaimana dan mengapa pemerintah meningkatkan transparansi fiskal dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran?
- Bagaimana reformasi dipertahankan setelah beberapa waktu?
- Kapan dan bagaimana peningkatan fiskal dan partisipasi fiskal dapat meningkatkan tanggapan dan pertanggung jawaban pemerintah?

Anda dapat membaca ringkasan buku ini di [Blog Open Budgets](#) dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai cara memesan salinan buku ini di [halaman Publikasi Utama yang baru](#).

#### Setelah MDG: *Open Budgets* Harus Menjadi Bagian Agenda Pembangunan Pasca 2015

Pada bulan Juli 2012, Amerika Serikat membentuk *High-level Panel* (HLP) untuk memberi saran mengenai kerangka kerja pembangunan global setelah tahun 2015, tanggal sasaran untuk *Millennium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Milenium/MDG). Setelah rapat pada bulan Maret di Bali, panel ini mengidentifikasi empat bidang [pernyataan resmi](#) di mana kemajuan diperlukan untuk memastikan kesuksesan tujuan pasca tahun 2015, termasuk transparansi dan pertanggung jawaban. Sebagai bagian dari upayanya untuk memastikan bahwa generasi tujuan pembangunan global berikutnya mencakup target-target mengenai transparansi anggaran dan partisipasi anggaran, [IBP mengeluarkan tanggapan](#) terhadap pernyataan resmi Bali.

#### Laporan Tahunan IBP 2012

Lihatlah [Laporan Tahunan 2012](#) untuk melihat IBP menurut Nomor, Penekanan dari pekerjaan tahun itu, tampilan khusus mengenai *Partnership Initiative* (Inisiatif Kemitraan), dan sederetan esai singkat mengenai *Lessons Learned* (Pelajaran yang Dipetik) mengenai cara terbaik untuk mendukung advokasi anggaran masyarakat sipil dan memajukan anggaran terbuka.

[Publikasi IBP](#)

[Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini](#)

## Lowongan Kerja dan Peluang

[Petugas bidang Program untuk Pembangunan dan Populasi Global, William and Flora Hewlett Foundation](#)

[Koordinator Lokakarya dan Proyek, School of Data](#)

## Yang Kita Ketahui Mengenai Pekerjaan Anggaran Masyarakat Sipil

[Bagian berikut adalah kutipan dari Laporan Tahunan IBP tahun 2012. Akses ke laporan selengkapnya ada di [sini](#).]

Selama 15 tahun terakhir, pusat fokus IBP adalah membuka sistem anggaran dan memajukan keterlibatan masyarakat sipil di dalamnya, dengan tujuan memperbaiki pemerintahan dan meraih berbagai manfaat konkrit bagi kaum miskin dan kaum terpinggir di semua negara di seluruh dunia. Menurut pengalaman kami, organisasi masyarakat sipil bisa sangat mempengaruhi praktek, kebijakan, dan hasil anggaran. Berikut ini adalah empat esai yang masing-masing menelusuri aspek yang berbeda mengenai pekerjaan anggaran masyarakat sipil dan lingkungan di tempat pekerjaan itu dilakukan, dan bagaimana para pelaku dari luar dan perantara seperti IBP dapat mendukung pekerjaan tersebut sehingga menjadi paling berpengaruh. Bila digabungkan, esai-esai ini tidak berusaha menggambarkan cakupan sepenuhnya mengenai yang telah kita pelajari, namun setiap esai menyajikan pelajaran yang amat sangat penting bagi masa mendatang.

### ***Apa yang Dapat Dicapai oleh Organisasi Masyarakat Sipil, dan Pendekatan Apa yang Paling Efektif?***

Selama lima tahun terakhir, IBP berusaha membuat dokumentasi yang lebih baik mengenai dampak kampanye masyarakat sipil untuk mempengaruhi anggaran dan penyediaan layanan pemerintah. Dokumentasi yang akurat mengidentifikasi berbagai pelajaran yang dapat diterima dan digunakan oleh praktisi, dan yang dapat membantu IBP maupun lainnya untuk menyelaraskan bahan pelatihan dan mendukung para mitra masyarakat sipil. Pada akhirnya, IBP akan menerbitkan 22 studi kasus mengenai kampanye di seluruh dunia, dan semua pelajaran di bawah ini diambil dari makalah draf yang berkelanjutan mengenai pekerjaan ini.

### **Dampak anggaran macam apa yang dapat dicapai oleh OMS?**

***Pekerjaan anggaran OMS memperkuat kualitas dan keragaman debat publik mengenai masalah keuangan publik yang amat sangat penting, memperluas pilihan kebijakan dan mempertajam tekanan masyarakat untuk reformasi.*** Misalnya, BNDES Platform di Brasil, sebuah koalisi yang luas di kalangan OMS, tetap menempatkan masalah transparansi bank pembangunan nasional pada agenda publik di saat tidak ada kalangan elit di pemerintahan yang siap membicarakannya. Platform ini memfasilitasi partisipasi dalam debat yang diikuti oleh jaringan persatuan perdagangan yang sangat luas, penduduk pribumi, dan organisasi lingkungan hidup. Setelah terjadi sederetan skandal keuangan, lingkungan hidup, dan hak azazi manusia, bank pembangunan menghadapi tekanan yang luas dari koalisi tersebut dan lainnya agar beroperasi dengan lebih transparan, dan bank pembangunan menanggapi dengan keterbukaan yang lebih besar.

***OMS berperan terhadap perbaikan kebijakan dan alokasi anggaran yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat.*** Misalnya di Afrika Selatan, *Treatment Action Campaign* (Kampanye Aksi Pengobatan) menggunakan analisa anggaran dalam perkara pengadilan yang penting untuk membuktikan bahwa pemerintah mampu membiayai program pengobatan HIV/AIDS. Gugatan di pengadilan ini membuahkan pengeluaran tambahan untuk biaya kesehatan yang menyediakan pengobatan antiretroviral bagi lebih dari 1,6 juta penduduk. Di Brasil, INESC menghambat reformasi

pajak yang regresif yang akan membahayakan pengeluaran penting senilai lebih dari US\$7 milyar dalam bidang kesehatan saja. In Argentina, gugatan pengadilan yang inovatif oleh ACIJ memaksa pemerintah Kota Buenos Aires untuk menyediakan infrastruktur, bahan pembelajaran, dan guru yang meningkatkan akses ke pendidikan pra sekolah untuk 7.000 anak dari keluarga miskin.

***Pekerjaan anggaran OMS dapat memperbaiki pelaksanaan pengeluaran pemerintah, mengurangi kebocoran dan menyediakan layanan pemerintah yang lebih baik.*** Di India, *National Coalition for Dalit Human Rights*, mengidentifikasi dana sebesar US\$150 juta yang sedianya ditujukan untuk layanan masyarakat bagi kaum Dalit namun dialihkan ke Pesta Olahraga Persemakmuran. Advokasi selanjutnya oleh NCDHR telah memaksa pemerintah untuk mengembalikan sebagian besar dana tersebut guna menyediakan semua layanan yang dijanjikan. Di Tanzania, Sikika berhasil menekan pemerintah agar menetapkan beberapa peraturan baru untuk mencegah pemborosan pengeluaran di sektor kesehatan. Di Meksiko, penelitian Fundar memaksa pemerintah memperkenalkan tingkat-tingkat manfaat minimum dan maksimum bagi program subsidi pertanian yang berkaitan dengan NAFTA sebesar US\$2 milyar per tahun yang membatasi jumlah yang dapat digunakan oleh agribisnis besar dan menambah manfaat bagi petani kecil.

***Kampanye anggaran OMS saat ini berperan atas kemampuan warga negara dan masyarakat sipil untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah di kemudian hari.*** Para aktivis anggaran yang mempelajari keahlian analisa dan advokasi dalam satu bidang atau satu negara seringkali muncul kembali untuk berperan agar menebarkan dampak dalam sektor terkait, atau bahkan negara-negara lain dengan konteks serupa. Selain pengaruh penyebaran dengan orang-orang ini, berbagai taktik advokasi yang dibuat dalam kampanye atau strategi pembangunan organisasi yang diterima dalam satu konteks tampaknya menyusupi "semangat waktu advokasi" dan ditiru lainnya dalam konteks yang berbeda. Pelajaran ini harus ditelusuri lebih lanjut karena membantu memahami bagaimana kampanye masyarakat sipil dipertahankan dan diperkuat setelah beberapa waktu.

**Pekerjaan anggaran OMS jenis apa yang cenderung lebih berdampak?**

**Yang cenderung lebih berdampak adalah OMS yang berfokus pada hasil-hasil strategis jangka panjang, bukannya pada hasil proyek jangka pendek.** OMS cenderung lebih efektif jika bebas mengalihkan fokus pekerjaan anggaran mereka untuk menanggapi munculnya kesempatan yang sejalan dengan strategi jangka panjang mereka. Namun OMS bergumul untuk terlibat dalam perencanaan strategis dan memberikan tanggapan yang tangkas jika dasar pendanaan mereka adalah menyelesaikan kegiatan proyek yang telah ditentukan sebelumnya. Penyandang dana dapat membantu dengan menyediakan lebih banyak dana inti yang berjangka panjang dan terkait dengan tujuan jangka panjang, sehingga organisasi dapat bersifat fleksibel untuk mengambil keputusan alokasi strategis jangka pendek.

***OMS yang sukses adalah menyesuaikan strategis advokasi mereka untuk menanggapi perubahan dalam lingkungan.*** Khususnya, kemampuan dan kesediaan organisasi untuk beralih antara konfrontasi dan kerja sama merupakan kunci keberhasilan kampanye anggaran. Akhirnya pemerintah tetap mempertahankan kedaulatan atas keuangan masyarakat, sehingga seringkali kampanye akan terlibat dengan negara. Kelompok ACIJ memperlihatkan fleksibilitas yang sangat efektif. Pertama, mereka berhasil menggugat pemerintah Buenos Aires agar menyediakan infrastruktur yang memadai bagi pendidikan pra sekolah, kemudian mereka beralih dari pendekatan konfrontasi menjadi bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan putusan pengadilan.

***Kampanye OMS jangka menengah sampai jangka panjang berdampak lebih besar karena penyediaan layanan berkelanjutan dan reformasi kebijakan sering membutuhkan perubahan yang komprehensif dan berturut-turut.*** Misalnya, NCDHR di India pertama-tama menggunakan hak memperoleh informasi untuk mendapatkan data mengenai dana yang dialokasikan bagi kasta-kasta yang miskin dan rentan. Selanjutnya, mereka berhasil melakukan kampanye untuk pembentukan "kode 789", yang memungkinkan masyarakat sipil untuk melacak dana yang dialokasikan bagi kasta Dalit. Akhirnya, dengan menggunakan kode ini untuk melacak dana, mereka mampu mengidentifikasi dana yang dialihkan ke Pesta Olahraga Persemakmuran, dan akhirnya berhasil menekan pemerintah untuk mengembalikan dana itu ke program-program kasta khusus.

**Kampanye OMS yang sukses adalah menargetkan pengambil keputusan de facto (pada kenyataannya) dan bukan hanya de jure (menurut hukum) dalam pemerintahan.** Mekanisme partisipatif resmi, misalnya dengar pendapat mengenai anggaran legislatif, dapat memberikan berbagai cara yang penting untuk mempengaruhi pengambil keputusan menurut hukum. Tetapi kenyataannya, OMS dan warga negara sering menggunakan lebih banyak pengaruh dengan mengarahkan jalan-jalan kekuasaan yang tidak resmi (*de facto*). Misalnya di Brasil, INESC berhasil menggagalkan legislatif untuk menentang usulan reformasi pajak regresif dengan memberitahu beberapa kementerian terkait dan komite parlemen mengenai kemungkinan dampak yang berbahaya akibat reformasi ini atas layanan kesehatan dan sosial. Setelah INESC menang atas semua konstituen pokok ini, pimpinan legislatif mengadakan debat yang menggagalkan usulan reformasi itu.

**Kampanye OMS yang sukses adalah bermitra dengan pelaku pertanggung jawaban lain dan berbagai lembaga – misalnya lembaga audit, media, legislatif, donatur, dan orang dalam yang bersimpati di dalam pemerintahan.** Studi kasus jelas menunjukkan bahwa OMS amat berperan pada hasil-hasil anggaran, namun jarang sendirian. Dalam sebagian besar kampanye yang sukses, masyarakat sipil membentuk kemitraan resmi dan tidak resmi bersama lembaga-lembaga pertanggung jawaban lainnya. Hubungan antar lembaga dalam ekosistem pertanggung jawaban inilah yang memberikan jalan berkelanjutan menuju pertanggung jawaban anggaran.

Semua kampanye yang disebutkan dalam bagian ini telah didokumentasikan dalam studi-studi kasus yang tersedia di sini: [http://internationalbudget.org/ibp\\_publication\\_categories/case-studies/](http://internationalbudget.org/ibp_publication_categories/case-studies/).

## **Belajar Sambil Melakukan: Pendekatan Kemitraan Aktif**

Dalam tahun-tahun terakhir, *International Budget Partnership* telah menyelidiki berbagai cara baru untuk bekerja melalui kerja sama langsung dengan berbagai organisasi mitra. Semua eksperimen ini telah memberi kami wawasan mengenai cara-cara baru yang digunakan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk bekerja dan belajar, yang membentuk dasar bagi jenis keterlibatan yang lebih dalam yang akan kami terapkan di lebih banyak negara. Esai singkat ini menggambarkan sebagian dari upaya awal kami untuk menjalin kemitraan aktif di satu negara (Kenya) dan apa yang telah kami pelajari dari pendekatan tersebut sejauh ini.

Pada akhir tahun 2012, *Economic and Social Rights Centre* (Haki Jamii) di Kenya mempekerjakan seorang pakar ekonomi berusia muda untuk memimpin pekerjaan analisa anggaran mereka dalam hal tanah dan perumahan. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa mengenai hal ini, kecuali bahwa Haki Jamii belum pernah memiliki analis anggaran di lokasi, dan tidak memikirkan pekerjaannya dalam hal ketentuan anggaran sampai beberapa bulan sebelumnya.

Berubahnya pemahaman Haki Jamii mengenai pekerjaannya itu sebagian terjadi karena kerja sama yang unik dengan IBP. Kerja sama tersebut lahir dari berbagai macam keuntungan yang komparatif - kemampuan analisa anggaran yang dimiliki IBP dan pengetahuan Haki Jamii yang mendalam mengenai masalah reformasi tanah – tetapi memiliki keprihatinan bersama. Tanah adalah salah satu masalah politik dan sosial yang paling menjengkelkan di Kenya saat ini. Begitu pentingnya hal itu sehingga Konstitusi 2010 mengambil sederetan langkah, termasuk pembentukan *National Land Commission* (Komisi Tanah Nasional) baru untuk memfasilitasi reformasi tanah. Haki Jamii maupun IBP prihatin bahwa meskipun bermaksud baik, reformasi itu tidak akan dilaksanakan. Khususnya, reformasi akan menjadi lebih singkat jika tidak didanai dengan semestinya.

Kami memutuskan untuk mengatasi masalah ini bersama-sama, baik dalam menyusun strategi, analisa, dan melakukan penjangkauan. Hasilnya, media dan berbagai jaringan warga negara yang lebih luas di Kenya disadarkan akan semua tantangan dalam melaksanakan reformasi tanah. Haki Jamii menemukan sarana yang baru dan hebat — yakni analisa anggaran — untuk mendukung advokasinya dan tahu bahwa mereka perlu membina kemampuan lebih lanjut di bidang ini. Kendati Haki Jamii umumnya menghargai potensi pekerjaan anggaran di awal proyek tersebut, baru pada saat proses kerja sama itulah organisasi ini mulai benar-benar menyadari mengapa pekerjaan ini sangat berharga.

Pengalaman ini mengandung pelajaran yang luar biasa bagi IBP, juga: Kerja sama secara langsung antara IBP dan para sekutunya di dalam masyarakat sipil dapat mempercepat proses ini yang olehnya berbagai organisasi mengetahui pekerjaan anggaran dan mulai memahami nilainya. Bekerja sama dalam proyek tertentu dan ke arah tujuan tertentu memberikan kesempatan yang muncul secara organik dari pekerjaan untuk membina kemampuan organisasi dan mengembangkan serta menanamkan sarana analisis dan advokasi. Kesempatan ini memungkinkan pembelajaran yang lebih dalam dan lebih diterapkan dibanding yang biasanya terjadi dalam pelatihan atau loka karya resmi. Pelajaran yang diperoleh IBP dari semua interaksi ini juga dapat memberikan informasi pada pelatihan dan penelitian kami di masa mendatang.

Pekerjaan IBP di Kenya juga mendapati bahwa pembelajaran yang amat sangat cepat dan pekerjaan yang lebih mendalam juga dapat terjadi di mana kami dapat memfasilitasi pekerjaan gabungan *di seluruh* organisasi. Kendati OMS bisa bertemu dengan kelompok-kelompok lain untuk membahas berbagai masalah yang menjadi keprihatinan bersama, seringkali sulit beralih dari pertemuan menjadi kerja sama sesungguhnya.

Di Kenya, banyak organisasi merasa prihatin dengan devolusi dan memastikan bahwa sistem pemerintah yang baru sesuai bagi penduduk Kenya biasa, namun seringkali mereka menjangkau pemerintah secara individu daripada mengintai posisi bersama untuk melakukan advokasi. Tahun lalu, kami membantu mengumpulkan sekelompok OMS untuk menempa pendirian bersama mengenai peraturan seputar partisipasi masyarakat menurut sistem anggaran negara yang baru. Semua organisasi itu dapat membahas, berdebat, dan memiliki sederetan saran di bidang ini sehingga sembilan dari kelompok tersebut menerbitkan sebuah pernyataan bersama dengan IBP. Pembuatan dokumen ini memperkuat koordinasi masyarakat sipil dan membantu berbagai organisasi untuk lebih memahami masalah anggaran dan kebijakan. IBP membantu proses ini dengan mengurangi biaya aksi bersama: melalui tindakan mengorganisir, membuat draf, dan membujuk.

Upaya kerja sama yang berlainan ini membantu menangani tantangan lain bagi IBP dan mitra kami: Lebih dari mendorong sistem anggaran yang terbuka dan transparan sehingga benar-benar meningkatkan tuntutan informasi dan kesempatan yang tersedia untuk umum agar masyarakat berpartisipasi dalam proses anggaran. Jika tidak, tidak mungkin ada pertanggungjawaban yang sebenarnya. Misalnya di Kenya, semakin banyak data yang tersedia melalui *Open Data Initiative*. Namun banyak dari data terbuka ini belum digunakan karena masyarakat sipil tidak memiliki keyakinan dan tujuan untuk menggunakannya. Jenis-jenis kemitraan dalam hal belajar sambil melakukan yang digambarkan di sini dapat membantu pelan-pelan untuk memastikan bahwa informasi yang kini tersedia melalui transparansi anggaran yang lebih baik akan benar-benar digunakan oleh warga negara guna mempengaruhi kebijakan dan penerapannya.

Akhirnya, data digunakan bila masyarakat memahami bahwa data itu dapat membantu mencapai tujuan mereka. Melalui kemitraan secara langsung, selama ini tidak mustahil memperlihatkan pada para aktivis sipil bahwa data anggaran dapat membantu mereka memastikan pertanggungjawaban di berbagai macam bidang kebijakan. Idealnya, pembinaan kemampuan melalui kemitraan ini memungkinkan organisasi untuk mempertahankan advokasi anggaran di luar kemitraan.

Kemitraan aktif yang digambarkan di sini membuka sejumlah jalan bagi pekerjaan IBP di kemudian hari yang lebih selaras dengan konteks negara dan lebih mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam kesempatan untuk melahirkan dampak. Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan yang intensif dari staf di lokasi di samping penelitian, komunikasi, dan dukungan administratif untuk memanfaatkan semua kesempatan ini sepenuhnya. Di saat yang sama, memelihara pengoperasian IBP yang ekonomis dan efisien akan menurunkan risiko bersaing dengan para mitra karena sebagian besar pekerjaan ini membutuhkan kemitraan agar berhasil. Pendekatan kemitraan aktif bisa bermanfaat bagi semua mitra dan dalam berbagai macam cara: memudahkan pembelajaran dan adaptasi yang lebih cepat, mengembangkan berbagai metode baru untuk pekerjaan anggaran, dan melahirkan kekuatan yang saling melengkapi untuk meraih tujuan bersama.

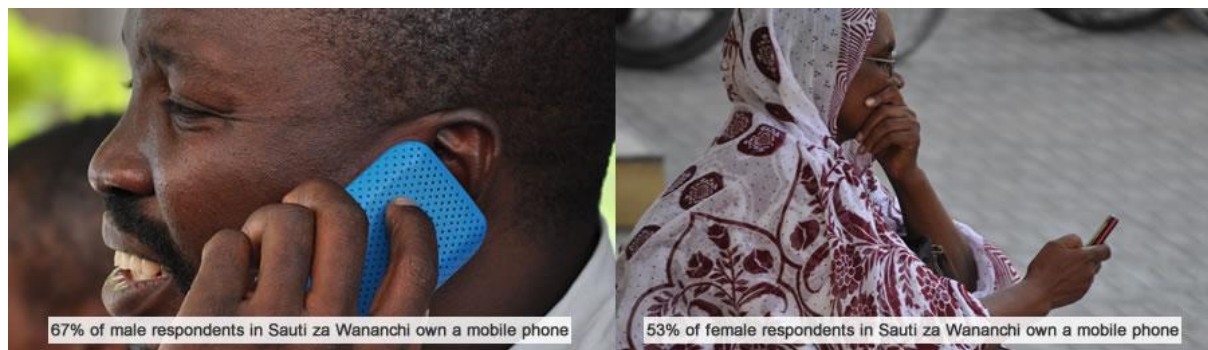
## Teknologi untuk Pemerintahan yang Lebih Baik dan Memberdayakan Masyarakat

**Sauti za Wananchi: Menggunakan Teknologi Telepon Seluler untuk Mendapatkan Umpan Balik yang Tepat Waktu dari Warga Negara Mengenai Penyediaan Layanan Masyarakat di Tanzania**, oleh Youdi Schipper, Twaweza, dan Cynthia Ugwuibe, *International Budget Partnership*

Di Tanzania, pembuat kebijakan secara rutin mengambil keputusan yang berdampak pada seluruh negara, namun sering melakukannya dengan informasi terbatas mengenai preferensi dan pendapat masyarakat. Mereka juga bergumul untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan kinerja.

Sauti za Wananchi (SzW), “*Voices of Citizens*,” adalah inisiatif baru dari Twaweza — sebuah OMS yang berfokus pada peningkatan akses publik ke informasi yang dapat diandalkan dan keterlibatan warga negara dalam penyediaan pendidikan, perawatan kesehatan, dan air bersih di Afrika Timur. SzW menggunakan telepon seluler untuk mengumpulkan informasi secara teratur mengenai masalah kebijakan terkait dan penyediaan layanan bagi masyarakat dari contoh beberapa warga negara yang mewakili. Inisiatif ini menerapkan metodologi yang sangat akurat dari survei tatap muka tradisional, namun menggunakan telepon seluler untuk mengumpulkan data wawancara sebagai cara untuk menekan biaya dan mempercepat proses pengumpulan data.

Alvin Etang, yang memimpin pengembangan survei melalui telepon seluler di Bank Dunia, menyambut inisiatif SzW ini karena “pengambil keputusan akan bisa mendapatkan informasi yang mewakili dan hampir di waktu nyata, mengenai kesejahteraan masyarakat mereka dan keberhasilan program mereka.”



SzW dilaksanakan dalam dua tahap.

Tahap 1: Ipsos Synovate, sebuah perusahaan penelitian yang dipekerjakan oleh Twaweza, melaksanakan survei dasar untuk rumah tangga dari bulan Oktober sampai Desember 2012. Survei ini dirancang menurut metodologi survei tradisional berdasarkan pengambilan contoh secara acak dan berlapis. Contoh yang terdiri dari 2.000 responden dari semua daerah di daratan Tanzania dipilih secara acak untuk berpartisipasi. Selama tahap ini, beberapa tim pencacah melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk membagikan telepon seluler dan pengisi daya baterai bertenaga surya kepada semua peserta. Dengan menyediakan telepon seluler dan pengisi daya baterai kepada semua responden, Twaweza memperhatikan fakta bahwa bahwa penghasilan rumah tangga cenderung akan mempengaruhi partisipasi survei dan tingkat tanggapan peserta: rumah tangga yang miskin cenderung kurang memiliki akses ke telepon seluler dibanding rumah tangga yang kaya. Satu-satunya faktor pembatas untuk pemilihan rumah tangga yang disertakan dalam SzW ini adalah penerimaan jaringan telepon seluler.

Tahap 2: Mulai bulan Februari 2013, peserta ditelepon dari sebuah pusat layanan informasi (*call center*)

setiap bulan. Panggilan telepon lebih disukai daripada pesan teks berdasarkan penelitian percobaan yang dilakukan di Dar es Salaam bernama “Mendengarkan Dar,” dan mendapati bahwa responden lebih responsif terhadap panggilan telepon suara dibandingkan pesan teks.

Setelah Ipsos Synovate melakukan wawancara survei dasar SzW, perusahaan ini memindai hasilnya menjadi format digital; mengidentifikasinya, mendokumentasikannya, dan menghapus semua kesalahan dalam data; kemudian mengeksport data itu ke dalam format perangkat lunak statistik. Saat ini, Uwazi, cabang penelitian dari Twaweza, secara sistematis memeriksa kembali data yang diterimanya dari Ipsos Synovate.

Setelah menyelesaikan verifikasi internal, Uwazi akan menampilkan data dasar, daftar pertanyaan, dan hasilnya, misalnya laporan singkat, grafik, dan penemuan, di situs web SzW. Data responden dari tahap dua juga akan tersedia untuk digunakan oleh pembuat kebijakan dan publik. Uwazi berencana memanfaatkan data tersebut untuk menulis laporan singkat mengenai kebijakan perihal topik-topik yang dicakup dalam survei melalui telepon seluler.

Karena inisiatif ini akan mengumpulkan umpan balik dari warga negara mengenai hasil, keefektifan, dan kepuasan masyarakat terhadap proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah, SzW bisa menjadi sarana yang berguna untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil anggaran nasional bagi National Audit Office of Tanzania, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para pemilik kepentingan lainnya, serta masyarakat.

Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai survei melalui telepon seluler oleh Sauti? Dapatkan rincian mengenai inisiatif SzW, survei melalui telepon seluler pertama kali di Afrika, dari [situs web Sauti za Wananchi](#). Mirip dengan SzW, inisiatif survei melalui telepon seluler, yakni [Mendengarkan Afrika](#) oleh Bank Dunia, akan mengumpulkan data bermutu tinggi yang tepat waktu mengenai akses dan mutu penyediaan layanan, kesejahteraan, dan banyak topik lainnya yang belum siap tersedia di Afrika.

## **Open Data Initiatives yang Memberdayakan Warga Negara dan Memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil**, oleh Cynthia Ugwuibe, *International Budget Partnership*

Dalam upaya menjadi lebih transparan, pemerintah, donatur, dan lembaga internasional “membuka data mereka” – yakni menyediakan akses yang luas dan merata ke catatan, data, dan informasi kebijakan yang sebelumnya mereka sembunyikan dari pengawasan masyarakat – dalam format yang mudah digunakan dan dipahami. Proyek *Open Data* mewakili kelompok inisiatif yang beraneka ragam dan biasanya mengandalkan informasi dan teknologi komunikasi (ITK). Warga negara, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan wartawan dapat menggunakan informasi yang baru tersedia ini untuk melakukan analisa anggaran dan menyajikan data dengan cara yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan penilaian yang lebih baik terhadap bagaimana program pemerintah, misalnya pengeluaran publik di bidang infrastruktur, ditangani dan berdampak pada hidup mereka.

### **Dari infografik ke portal *Open Data***

Pemerintah dan organisasi, misalnya [BudgIT](#) di Nigeria, menggunakan data yang tersedia untuk umum guna membuat infografik — penyajian informasi yang kompleks dalam bentuk teks dan grafik — untuk menyampaikan informasi dengan lebih baik mengenai anggaran nasional dan pengeluaran sektor tertentu. Dengan mengambil langkah lebih jauh dalam *Open Data*, [African Development Bank](#) dan negara-negara seperti [Chili](#) telah meluncurkan portal *Open Data* tingkat nasional, yang merupakan tempat penyimpanan serba ada secara *online* berisi informasi mengenai pemerintah. Pemerintah Kenya menyediakan banyak sekali data statistik, data demografis, dan data pengeluaran publik dalam *dataset* yang dapat diekspor dan tabel interaktif melalui [Kenya Open Data Initiative](#), yakni sebuah portal data pemerintah pertama yang terbuka yang dibuat oleh negara yang sedang berkembang. Dengan menggunakan informasi yang tersedia melalui [Kenya Open Data Initiative](#), para wartawan lokal seperti [Irene Choge](#) melakukan [analisa anggaran](#), dan berbagai OMS menciptakan aplikasi telepon seluler yang inovatif seperti [Kenya County Scorecard](#), yang memungkinkan pengguna untuk menganalisa fakta-fakta tingkat daerah dan mengevaluasi catatan reputasi anggota parlemen dan gubernur daerah.

### **Open Data di tingkat sub nasional dan regional**

Inisiatif *Open Data* juga semakin lazim di tingkat regional dan sub nasional. Di tingkat pemerintahan sub nasional, OMS dan pemerintah lokal menggunakan sarana visualisasi interaktif untuk melacak arus uang dan memantau kualitas pengeluaran. Proyek "[Mempedulikan Lingkungan Sekitar Saya](#)" di São Paulo, Brasil, menuliskan seberapa banyak pemerintah kotamadya mengalokasikan dan membelanjakan dana bagi proyek infrastruktur masyarakat, sehingga membantu warga negara melihat bagaimana pengeluaran pemerintah berdampak langsung pada masyarakat mereka. Di tingkat regional, [African Spending Project \(Proyek Pengeluaran di Afrika\)](#), sebuah inisiatif baru yang diadakan oleh *Open Institute*, *Africa Media Initiative*, dan *Open Knowledge Foundation*, akan menyediakan informasi mengenai dana masyarakat dari berbagai macam sumber, termasuk bantuan asing dan industri ekstraktif. Proyek ini akan memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan visual yang dapat disesuaikan beserta informasi dan memasukkan grafik dalam blog, artikel dan situs web.

### **Membina kemampuan OMS untuk menciptakan inisiatif *Open Data***

[Code4Kenya](#), sebuah program percobaan bersama yang didanai oleh Bank Dunia dan *Africa Media Initiative*, berusaha mengembangkan kemampuan bagi OMS untuk membuat proyek *open data* (data terbuka) sendiri. Dalam pelaksanaan percobaannya, program ini secara kompetitif merekrut empat profesional ITK yang ahli dari sektor teknologi yang kuat di Kenya untuk bekerja sama dengan media pilihan dan organisasi masyarakat sipil dalam kemitraan selama lima bulan. Selama periode tersebut, empat pakar ini membantu organisasi tuan rumah mereka untuk membuat aplikasi terbuka yang dikontrol oleh data dan membina kemampuan internal untuk memanfaatkan data dalam pekerjaan inti dalam organisasi tersebut. Inisiatif tersebut sukses dan [proyek-proyek hasilnya](#) ditempatkan di bawah lisensi *Creative Commons*.

Di saat OMS dan warga negara memanfaatkan informasi yang tersedia untuk umum guna mendidik dan memberdayakan mereka sendiri, mereka akan lebih diperlengkapi untuk berpartisipasi dengan penuh makna dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam terbitan buletin di kemudian hari, kami akan menelusuri sebagian dari inisiatif ini dengan lebih rinci.

## **Masyarakat Sipil Mendesak Anggaran Terbuka di Tingkat Lokal dan Nasional**

### **Koalisi Mesir Menggugat Pemerintah, Menuntut Anggaran Publik, oleh Jay Colburn, *International Budget Partnership***

Waktunya untuk anggaran di Mesir. Awal April, Menteri Keuangan Mesir pada saat itu, Al Morsi Hegazi, menyerahkan Proposal Anggaran Eksekutif kepada komite ekonomi Dewan Shura, yang merupakan majelis tinggi dari parlemen Mesir untuk dipertimbangkan. Tetapi pemerintah tidak mengeluarkan proposal anggaran kepada publik untuk dibahas dan untuk mendapatkan umpan balik mengenai beberapa kebijakan tertentu untuk menggalang dan membelanjakan dana masyarakat yang tertuang dalam dokumen yang amat sangat penting ini. [Egyptian Center for Economic and Social Rights](#) (ECESR) dan lainnya berdebat bahwa merupakan tugas konstitusional bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi masyarakat menurut Pasal 47, yang mengurus akses ke informasi, dan Pasal 55, yang berkata bahwa warga negara harus berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yang menuntut pemerintah untuk mengeluarkan proposal tersebut adalah anggota partai Sosial Demokrat Mesir, Maha Abdel Nasser, yang bersikeras bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan untuk hal-hal seperti kesehatan, pendidikan, polisi, dan militer.

Akses ke proposal anggaran itu sangat relevan karena dua alasan:

Pertama, dampak proposalnya dan kedua, tidak adanya pengawasan resmi yang kuat dalam merumuskan apa yang akan menjadi Anggaran yang Berlaku di tahun fiskal yang akan datang. Ada beberapa keprihatinan yang serius mengenai bagaimana anggaran baru itu akan berpengaruh atas kaum miskin di Mesir. Konon anggaran baru itu akan memotong subsidi bahan bakar hingga US\$5,2 milyar dan subsidi makanan hingga lebih dari US\$300 juta. Pemotongan subsidi ini yang dikaitkan dengan persyaratan yang diajukan oleh Dana Moneter Internasional untuk mendapatkan pinjaman sebesar US\$4,8 milyar yang sedang dipertimbangkan. Dan pemotongan ini bersifat kontroversial karena banyak kaum miskin di Mesir tidak akan mampu membeli kebutuhan pokok dan komoditas tanpa subsidi.



Untuk pertanyaan mengenai pengawasan, pertimbangan menyeluruh mengenai usulan anggaran dari pemerintah oleh seluruh legislatif dianggap sebagai bagian penting dari sistem pertanggung jawaban berdasarkan pengawasan dan keseimbangan. Karena itu, Konstitusi Mesir menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, yakni dewan yang lebih rendah dalam parlemen Mesir, bertanggung jawab untuk menyetujui anggaran nasional. Tetapi DPR dibubarkan oleh militer pada tahun 2012 dan belum dibentuk kembali. Karena itu, akan melanggar konstitusi bila Dewan Shura mengambil keputusan apapun mengenai anggaran, menurut Ali Soliman dari partai *Socialist Popular Alliance* (Aliansi Populer Sosialis).

Situasi di Mesir yang sistem pengawasan resminya berjalan tersendat-sendat menjadi kian buruk akibat kurangnya transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat. Pengawasan yang lemah dan kurangnya transparansi sama-sama melemahkan sistem pertanggung jawaban yang kuat, sedangkan sistem ini berperan pada keputusan yang baik mengenai cara terbaik untuk mengelola uang masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan efektif. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil?

Ada banyak taktik yang dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil untuk menekan pemerintah agar membuat informasi anggaran dapat diakses oleh masyarakat. Melalui [studi kasus di berbagai negara](#), IBP telah mendokumentasikan sejumlah strategi ini, antara lain: Membentuk koalisi yang luas untuk mendapatkan dukungan dan memperlihatkan relevansi di beberapa sektor masyarakat; mengadakan kampanye komunikasi yang luas melalui cetakan, siaran, dan media sosial; menyerahkan permintaan kebebasan informasi (di negara yang memiliki hukum seperti ini) melobi para pembuat keputusan utama dalam cabang eksekutif dan legislatif; dan menggunakan gugatan hukum.

Di Mesir, sebuah koalisi yang terdiri dari 17 kelompok hak azazi manusia, gerakan aktivis, dan partai politik oposisi terlibat dalam sebagian dari strategi ini, namun sebulan terakhir ini mereka memutuskan untuk menggugat pemerintah di pengadilan berdasarkan masalah konstitusi yang dijabarkan di atas. Pada bulan April, bagian dari kelompok ini (ECESR; empat partai politik: *Popular Socialist Coalition* (Koalisi Sosialis Populer), *Egyptian Social Democratic* (Sosial Demokrat Mesir), *Misr el Qaweya*, dan *Tayar el Masry*; serta tiga serikat buruh: *Egyptian Independent Federation for Trade Unions*, *Independent General Tax Collectors Union and Independent Union for Airport Workers*) mengajukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan dan menuntut agar Proposal Anggaran Eksekutif dikeluarkan kepada masyarakat. Keputusan memperkarakan pemerintah di pengadilan itu dilakukan setelah permintaan berulang kali kepada cabang eksekutif dan legislatif pemerintah untuk mengeluarkan dokumen tersebut tidak dihiraukan. Gugatan hukum itu diumumkan di sebuah konferensi pers yang diadakan oleh ECESR dan dihadiri oleh 16 anggota koalisi lainnya. ECESR adalah anggota [Global Movement for Budget Transparency, Accountability, and Participation \(BTAP\)](#) — sebuah gerakan luas yang terdiri dari para aktivis dan organisasi yang menangani masalah pertanggung jawaban keuangan dan anggaran masyarakat di seluruh dunia — dan telah mengambil langkah ini sebagai bagian dari kampanye global BTAP untuk meningkatkan transparansi anggaran di negara-negara yang paling buram di dunia.

Sejak gugatan tersebut diajukan, Kementerian Keuangan telah menampilkan proposal anggaran di situs web mereka kendati saat ini tidak mungkin menghubungkan keputusan itu dengan upaya koalisi. Tetapi pemilihan waktu dari keputusan kementerian tersebut menunjukkan bahwa koalisi ini mungkin telah memiliki dampak.

Anda dapat membaca siaran pers bersama tersebut di situs web ECESR di <http://ecesar.com/en/2013/04/21/release-the-public-budget-to-the-people-now/>.

## **Bekerja Sama untuk Memisahkan Menjadi Beberapa Bagian Devolusi di Kenya,** oleh Jason Lakin, *International Budget Partnership*

Pada tahun 2010, Kenya mengesahkan sebuah konstitusi baru. Hal ini menggerakkan sederetan reformasi yang harus dilaksanakan selama lima tahun, termasuk pembuatan tingkatan baru dalam pemerintahan (daerah) dan desentralisasi kekuasaan administratif, kekuasaan politik, dan kekuasaan fiskal. Pada bulan Maret tahun ini, gubernur daerah dan majelisnya dipilih, disusul oleh devolusi uang dan tanggung jawab.

Untuk melancarkan proses transisi ini, Kenya membentuk Otoritas Transisi dan memberi mandat padanya untuk memfasilitasi proses “tugas fungsional.” Pada dasarnya, tugas fungsional berarti melihat persyaratan konstitusional untuk membagi peranan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah (tertuang di jadwal khusus dalam konstitusi Kenya), dan membandingkannya dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Rincian kumpulan layanan yang saat ini disediakan oleh pemerintah kemudian dibagi dengan tepat di antara dua tingkatan, dan diikuti oleh anggaran untuk melaksanakan semua layanan ini .

Sayangnya, proses tugas fungsional ini sangat tertunda sehingga Kenya memiliki dua tingkat pemerintahan, namun tidak jelas mengenai siapa yang harus melakukan apa atau tidak ada distribusi keuangan yang benar. Proses ini juga tampak buram, artinya kebanyakan warga negara tidak tahu apa yang sejauh ini telah dilakukan atau kapan mereka dapat memberikan masukan untuk pembahasan ini.

Antara bulan Februari sampai April, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kenya berkumpul untuk menganalisa masalah ini di seluruh sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, air, dan pertanian. Organisasi itu antara lain adalah *Institute for Social Accountability*, *Institute of Economic Affairs*, *Article 19*, *Water and Livelihoods Reform Network*, *International Institute of Legislative Affairs*, Haki Jamii, dan *International Budget Partnership*. Tim tersebut membagi diri menjadi beberapa sektor dan meneliti dokumen anggaran dan kebijakan untuk memahami yang dikatakan oleh konstitusi, apa yang dipikirkan oleh pemerintah, dan di mana sisa kesenjangannya.

Pada bulan April, kelompok kerja ini menerbitkan sebuah makalah berjudul, “Siapa yang Bertanggung Jawab? Devolusi Bisa Gagal Tanpa Peranan yang Jelas.” Makalah ini merangkum berbagai keprihatinan utama mengenai semua sektor. Antara lain:

- Kurangnya kejelasan mengenai siapa yang akan mengelola rumah sakit di provinsi dan program imunisasi di Kenya.
- Fakta bahwa pemerintah nasional sedang berusaha mempertahankan peranannya dan anggaran dalam sektor perumahan, sekalipun jika perumahan telah didesentralisasikan ke daerah-daerah;
- Kurangnya kejelasan mengenai peranan daerah-daerah berkaitan dengan *Water Service Boards* (Dewan Layanan Air), dan kemungkinan kisruhnya penyediaan layanan air;
- Berlanjutnya peranan perusahaan negara dan banyaknya bagian anggaran untuk pertanian yang tetap berada di tingkat nasional kendati sebagian besar fungsi pertanian telah didesentralisasikan; dan
- Fakta bahwa anggaran modal dalam investasi untuk taman kanak-kanak tetap berada di tingkat nasional meskipun pendidikan taman kanak-kanak merupakan tanggung jawab daerah

Kelompok ini menyatakan bahwa kurangnya kejelasan peranan dapat melemahkan devolusi dan bahwa Otoritas Transisi dan semua kementerian jajarannya harus memberikan lebih banyak informasi kepada masyarakat mengenai rencana mereka untuk menyelaraskan penyediaan layanan dengan kerangka kerja baru yang didesentralisasikan. Selain itu, membagi tanggung jawab tidak hanya merupakan latihan teknis, namun juga harus mencakup konsultasi dengan masyarakat. Karena itu, kelompok kerja ini menuntut jadwal tugas fungsional disertai kesempatan khusus bagi masukan dari masyarakat.

Pada tanggal 18 April 2013, diadakan sebuah pertemuan dengan masyarakat sipil yang lebih luas di Kenya untuk membahas proses tugas fungsional, dan untuk membina dukungan bagi front bersama untuk terlibat dengan pemerintah nasional mengenai devolusi. Terlalu dini untuk menyebutkan dampak pekerjaan ini nantinya, namun analisa tersebut telah membantu mempersiapkan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses teknis dari tugas fungsional. Artinya, pemerintah nasional akan lebih sulit merebut kekuasaan kembali dan pembiayaan yang harus didesentralisasikan.

## Publikasi

### Publikasi IBP

Selama tiga tahun terakhir, IBP telah memimpin sebuah program penelitian yang ambisius yang bertujuan memperdalam pemahaman kami mengenai penyebab dan konsekuensi transparansi anggaran. Dengan membentuk tim bersama sebagian peneliti terbaik di bidangnya, kami memajukan analisa kuantitatif dengan menggunakan data OBI (tersedia di [sini](#)) maupun serangkaian studi kasus kualitatif yang melihat bagaimana transparansi anggaran telah berkembang setelah beberapa waktu dalam berbagai macam konteks negara. Hasil-hasil studi kasus tersebut kini tersedia di buku IBP yang baru terbit ***Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability*** / **Anggaran Terbuka: Ekonomi Politik mengenai Transparansi, Partisipasi, dan Pertanggungjawaban** (diterbitkan oleh *Brookings Institution Press*). Anda dapat membaca ringkasan buku ini di [Blog Open Budgets](#) dan mengetahui lebih jauh mengenai cara memesan salinan buku ini di [halaman Publikasi Utama yang baru](#).

IBP telah menambahkan **dua studi kasus baru** pada upayanya yang berkelanjutan dalam mendokumentasikan kapan dan dalam keadaan apa advokasi anggaran masyarakat sipil memiliki dampak pada praktek dan kebijakan anggaran pemerintah, serta hasilnya. Penelitian baru ini mengamati bagaimana para mitra IBP, yakni [Social Justice Coalition \(SJC\)](#) dan [Legal Resources Centre \(LRC\)](#), secara efektif telah menggabungkan analisa anggaran ke dalam strategi advokasi mereka untuk menekan pemerintah-pemerintah lokal di Afrika Selatan agar meningkatkan layanan bagi masyarakat. Penelitian dan analisa anggaran yang dilakukan LRC memperkuat kesuksesan tuntutan hukumnya untuk memaksa pemerintah propinsi Cape Timur untuk menyediakan berbagai fasilitas pendidikan yang memadai. Pendekatan SJC yang terdiri dari beberapa segi – yang mengandalkan penelitian anggaran yang intensif, publisitas media yang menargetkan kaum miskin dan kaum berada, protes masyarakat, dan strategi hukum – ini telah berhasil menekan Dewan Kota Cape Town untuk memperkenalkan dan mempertahankan berbagai fasilitas sanitasi yang bersih dan aman di pemukiman tidak resmi, yakni Khayelitsha. Untuk membacanya dan membaca berbagai studi kasus Program Pembelajaran lainnya, [klik di sini](#).

IBP baru menerbitkan **Laporan Tahunan 2012**. Bacalah prestasi yang diraih oleh IBP dan para mitranya selama setahun terakhir dan ketahuilah pemikiran kami mengenai hal-hal yang telah kami pelajari setelah 15 tahun mendukung pekerjaan anggaran masyarakat sipil dan terlibat di dalamnya. Bacalah di [sini](#).

### **Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini**

[Liputan yang relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.](#)

HELVETAS, sebuah badan pembangunan utama di Swiss, bekerja sama dengan *Institute of Development Studies* untuk mengamati pertanggungjawaban di negara-negara yang rapuh. [Laporan penelitian ini](#) terdiri dari empat bagian: Studi kasus di Bangladesh, Mozambik, dan Nepal; dan sebuah esai. [Studi kasus di Nepal](#) mengamati peranan Audit Publik atas proyek pembangunan, dan mendapati bahwa audit warga negara dan konsultasi sebelumnya telah mengurangi korupsi dan meningkatkan keefektifan beberapa intervensi pembangunan tertentu. [Studi kasus di Bangladesh](#) mengadakan survei atas kelompok-kelompok pemerintah lokal yang mengadakan konsultasi dengan warga negara untuk membagikan informasi anggaran mengenai berbagai proyek pembangunan dan mendapati bahwa lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan partisipasi kaum terpinggir, meski penerapan Undang-Undang Hak Keterbukaan Informasi telah meningkatkan transparansi anggaran. [Studi di Mozambik](#) melihat upaya desentralisasi untuk membentuk “administrasi publik bagi pembangunan” di tingkat lokal di mana warga negara mempengaruhi pengambilan keputusan melalui *conselhos consultativos* yang dipilih. Studi ini mendapati bahwa program tersebut dapat meletakkan dasar bagi masyarakat sipil dan warga negara untuk memainkan peranan pertanggungjawaban yang bermakna, namun lebih banyak hal yang perlu dilakukan untuk membina kapasitas dalam masyarakat sipil yang lemah dan terpecah-pecah di negara itu. Akhirnya, [esai](#) yang mengumpulkan semua pelajaran yang telah dipetik, termasuk pentingnya pendidikan anggaran dan mendorong pembagian informasi, dan menyarankan agar organisasi donor berusaha memperkuat hubungan antara pelaku dalam “ekosistem pertanggungjawaban” (istilah yang diciptakan oleh Albert van Zyl dari IBP).

Sebuah artikel dalam [Journal of Public Deliberation](#) terbitan terbaru meneliti dampak partisipasi warga negara dalam dewan kesehatan lokal di Brasil, di mana konsultasi dengan warga negara perlu dilakukan

untuk mengambil keputusan tertentu. "[\*What did we learn about citizen involvement in the health policy process: lessons from Brazil \(Apa yang kami pelajari mengenai keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan kesehatan: pelajaran dari Brasil\)\*](#)" mendapati bahwa menggalang warga negara untuk berpartisipasi dalam forum konsultatif telah membantu mengurangi ketidaksetaraan pengeluaran bagi kesehatan masyarakat di seluruh kotamadya.

Pakar anggaran James Savage menulis laporan khusus untuk *U.S. Institute of Peace*, "[\*Iraq's Budget as a Source of Political Stability \(Anggaran Irak sebagai Sumber Stabilitas Politik\)\*](#)." Beliau berpendapat bahwa karena proses anggaran Irak memberikan kerangka kerja bagi pelaku politik untuk bekerja sama, anggaran itu bisa berperan atas upaya-upaya jangka panjang untuk menciptakan perdamaian. Tetapi diperlukan reformasi lebih lanjut, termasuk transparansi yang lebih besar untuk proses tersebut; Irak mendapat skor 4 pada Indeks Anggaran Terbuka (*Open Budget Index*) 2012.

## Lowongan Kerja dan Peluang

### **Petugas bidang Program untuk Pembangunan dan Populasi Global, William and Flora Hewlett Foundation**

William and Flora Hewlett Foundation sedang mencari dua Petugas Program yang baru untuk Program Pembangunan dan Populasi Globalnya. Deskripsi pekerjaan ini dapat Anda lihat di bawah dan di situs web Foundation di [www.hewlett.org/careers](http://www.hewlett.org/careers). Petugas bidang Program akan ditempatkan di Menlo Park, California, dan akan bertanggung jawab atas pemberian hibah bersama rangkaian "kebijakan berdasarkan bukti", mulai dari dukungan pengumpulan data dan kemampuan analisis sampai penelitian kebijakan mengenai masalah sosial dan ekonomi serta evaluasi dampak, terutama di Afrika Timur dan Afrika Barat. Yayasan ini mencari calon karyawan yang memiliki keahlian dalam ilmu sosial, penelitian kebijakan, dan bidang transparansi dan pertanggungjawaban, memahami konteks politik dan sosial Afrika, memperlihatkan kemampuan berpikir secara strategis, dan memiliki catatan reputasi keunggulan dalam pekerjaan yang melibatkan kerjasama. Calon yang berminat harus mengirimkan surat pengantar dan CV kepada Daniel Sherman di *Explore Company* [resumes@explorecompany.com](mailto:resumes@explorecompany.com).

### **Koordinator Lokakarya dan Proyek, School of Data**

School of Data sedang mencari Koordinator Lokakarya dan Proyek. *Rincian mengenai peranannya dan cara melamar tersedia di [sini](#). Mereka mencari seseorang yang mampu mendorong diri sendiri, teratur, dan pandai berkomunikasi. Orang ini harus mampu melaksanakan sejumlah proyek secara bersamaan, berbicara dalam berbagai acara, dan bepergian. Mereka membutuhkan penerjemah teknologi yang supel, yang dapat berempati pada kebutuhan organisasi nirlaba, wartawan, dan warga negara yang terlibat serta menerjemahkan teknologi kepada manusia agar mereka dapat mulai belajar. [School of Data](#) berusaha memberdayakan organisasi masyarakat sipil, wartawan, dan warga negara dengan berbagai keahlian yang mereka butuhkan untuk menggunakan data secara efektif dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan lebih berkelanjutan.*